

KOTA PINANG - 21464
Email: blh.labusel@yahoo.co.id
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN



TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA



KotaPinang, Mei 2022

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselaskannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran pedoman utama pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Pencairan tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Lingkungan hidup secara ber tahap dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGAJUAN	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I: PENDAHULUAN	ii
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022	5
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maknud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelegeraan Tugas dan Fungsisi Dinas Lingkungan Hidup	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Teleahuan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	14
3.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV : PENUTUP	

Perluabahan Rencana Kejia (Perluabahan Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 disusun dalam rangka penyelidikan dokumen perencanaan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan satu tahun ke depan yang berisi klasifikasi pelaksanaan Rencana Kejia taun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Rencana Kejia dan Pendanaan.

Seluruh dokumen perencanaan merupakan satuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kejia dan anggaran. Sebagai sebutah dokumen resmi rencana kejia Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu mengikuti antara perencanaan DLHP dengan Rencana Kejia Perangkat menjembaati antara perencanaan DLHP dengan Rencana Kejia Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Rensstra DLHP yang menjadikan kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perluabahan Rencana Kejia DLHP disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokrasi yang sebagaimana dasar penyusunan Renja 2022, Rencana Kejia Anggaran

Perbaikan Kema (Rancangan Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendirikan partisipasi masyarakat. Dokumen Perbaikan Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan dan penyusuan rancangan.

Perimbahan Rencaan Kejia Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau selanjutnya disebut Perimbahan Rencaan Merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan satu tahun berjalan. Perimbahan Renja OPD sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan segera teknis berpedoman pada Permenagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1.1. Latar Belakang

PENDAHULUAN

BAB I

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pemberitahuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4868).

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(RRA) DLHP, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencaha Kejia Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minal (Lembaran Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencaha Pembanungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Perangguawaban Kepada Daerah Pemerintah, Laporan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Perangguawaban Kepada Pemerintah, Laporan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Lingkungan hidup selama satu tahun melalui suatu program yang menetapkan skala prioritas dan kegiatan pembangunan di bidang Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kelola 2022, adalah untuk kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Maka sudi disusunnya Perubahan Rencana Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2022 ini, adalah untuk memberikan landasan kebijakan takis strategi pada tahun 2022 di bidang lingkungan hidup, dalam kerangka dan Perikanan Tahun 2022 ini, adalah untuk memberikan landasan kebijakan maupun lebih jauh dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sendiri, takis strategi pada tahun 2022 di bidang lingkungan hidup, dalam kerangka dan Perikanan Tahun 2022 ini, adalah untuk memberikan landasan kebijakan kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

1.3. Maklud dan Tujuan

20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Rencana Kelola Pemerintah Daerah; serta cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kelola Instansi Pemerintah Daerah;
17. Instansi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Lembaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kelola dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

BAB I	PENDAHULUAN	<p>Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :</p> <p>Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Rencja) Dinas Lingkungan Menguralkan terhadap Perikanan tahun berjalan dan capaian rencana Dinas Lingkungan Menguralkan tentang evaluasi pelaksanaan rencja Dinas Lingkungan Menguralkan terhadap Perikanan tahun berjalan dan capaian rencana Dinas Lingkungan Terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran rencja DLHP, program dan kegiatan.</p>
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN	<p>Tujuan serta sistematika Penyusunan.</p> <p>Berisi uraian tentang latar Belakang, Dasar Hukum, Maklud dan HIDUP TAHUN 2022</p>
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	<p>Menguralkan tentang evaluasi pelaksanaan rencja Dinas Lingkungan Penelahanan usulan Program dan kegiatan Masayarakat.</p> <p>Terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran rencja DLHP, program dan kegiatan.</p>
BAB IV	PENUTUP	<p>Indak Lanjut.</p> <p>Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana</p>

Penadapatuan dan Belanja Darerah APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.4. Sistematika Penyusunan

a. Program : Penunjangan Ursan Pemerintah Daerah sebagaimana berikut:

Labuhanbatu Selatan tahun 2022 pada tabel 2.2. Evaluasi Renja Tahun 2022, kegiatan rencana Dinas Lingkungan Hindu dan Perikanan Kabupaten Realisasi Kinerja pelaksanaan dan penyebarluasan anggaran program dan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentasi Realisasi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	800.000.000,-	293.642.000,-	36,70
2	Belanja Daerah	8.667.444.651,-	471.247.431,-	5,43
3	Surplus/Defisit	7.867.444.651,-	177.605.431,-	2,25

Table 2.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
dengarkan tabel berikut.

dan telah terrealisasikan sebesar Rp 471.247.431,- atau sebesar 5,43% sesuai dalam pos belanja langsung dengarkan jumlah dana sebesar Rp 8.667.444.651,- terdiri dari 8 (delapan) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang termasuk di kegiatan dilinjukup Dinas Lingkungan Hindu dan Perikanan tahun 2022 yang sementara Belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk gaji pokok dan tunjangan Tahun 2022 sebesar Rp 8.667.444.651.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hindu dan Perikanan pada

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN

TAHUN 2022

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BAB II

- Berdasarkan hasil evaluasi rencana pelaksanaan kegiatan Lampiran I, tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan / kendala antara Latin adalah
- Anggaran belanja DLH yang relatif kecil seiringga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal

e. Program : Pengelelahan Persampahan Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program pengelelahan persampahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga pencapaian berkatagori 3,24%.

d. Program : Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup (PP LH) belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkatergori 0%.

c. Program : Pengelolahan Keanekarragaman Hayati (Kehat)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pengelolahan Keanekarragaman Hayati (Kehat) belum belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkatagori 0,23% .

b. Program : Pengendalian Penjemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pengendalian Penjemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkatagori 0% .

Hidup

2.3. Isu-isu Penitig Penyelemparan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan

Tugas pelayanan yang dilaksanakan DLH terkait penyuatan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2020 yang mencapai 88,56 persen telah mendapat dilihat dari serapan dan pencapaian target program dan kegiatan LAKIP, RENJA, RENSTRA, SLHD serta dokumen terkait dokumen lingkungan.

Tugas pelayanan yang dilaksanakan DLH terkait penyuatan dokumen-

pembangunan.

Penjabaran program pada misi-misi dokumen sebagai acuan pelaksanaan penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan, ketekaitan antar dokumen yakni penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan, ketekaitan sektor lingkungan dan lapangan. Kinerja pelayanan DLH dalam keberhasilan penyuatan dan ditasai dengan melakukannya koordinasi bersama sektor terkait dan adaptasi rekommendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat pengendalian terhadap kegiatan stau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekommendasi kelayakan lingkungan. Sedangkan pembatasan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukannya pembinaan, pengawasan dan

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan,

dilakukan dimis-misi bidang.

Dalam melakukannya koordinasi lintas OPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis yang daerah serta peneguhannya dalam menjamin otonomi dan pemerintahan yang menjadikannya berdasarkan atas assosiasi pembangunan memiliki tugas pokok dan fungsi membantu upaya dalam melaksanakan urusan perangkat daerah Kabupaten Lamongan Selatan Dinas Lingkungan Hidup tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Selatan Nomor 42 Tahun 2016

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

- Sarana dan prasarana yang terbatas baik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

- dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini tingkat bahan yang yang bersal dari proses produksi dengan reduksi adalah upaya untuk mengurangi volume, konseptasi, toksisitas, dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan jumlah dan ragaam sampah masarakat. Pengangutan sampah dengan kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkebangnya perlu diubah. Permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) mengakibatkan selatan belum maksimal, pengelolaan sampah yang masih labuhanbatu sampah yang tak dapat diurai. Pengelolaan sampah kabupaten sampah kebutuhan masarakat yang meningkat, akibatnya timbulnya • Dampak kebutuhan masarakat yang meningkat, akibatnya timbulnya masarakat sekitarinya.
- polusi udara, air, tanah sehingga mengurangi kualitas kesehatannya Kawasan industri, perkembunan yang dapat mengakibatkan peningkatan terjadi ny kerusakan lingkungan di daerah-daerah pengembangan • terjadi ny kerusakan lingkungan di daerah-daerah pengembangan yang tak dapat diurai. Pengelolaan sampah kabupaten sampah yang tak dapat diurai. Pengelolaan sampah kabupaten sampah kebutuhan masarakat yang meningkat, akibatnya timbulnya

Ibu strategis DLH berkaitan dengan Misi dan tujuan RPJMD yakni

pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. dan willya ah setia kesadaran masarakat dengan tujuan mewujudkan yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur yang menunjang pembangunan industri dan misi yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-2 ditinjau dari tugas pokok dan fungsi secara umum untuk mencapai visi nasional, provinsi dan lintas kewillyahan.

nasional, provinsi dan lintas kewillyahan. Lingkungan hidup dan menuangkannya kedalam program prioritas masarakat, lintas sektor dan menyelarasakan dengan program prioritas masarakat, yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan ruang lingkup keweningananya. Keweningananya meliputi permusuhan kebijakan, kebijakan dan melakukannya koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan mempunyai tugas utama membantu kepada Daurah dalam merumuskan dan Pemerintah Daurah kabupaten/Kota, Embaga lingkungan hidup pembagian Ursan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daurah Propinsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang

- adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimilasi sampah menakluk tinggi usaha dasar yang dilakukan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle (menandur ulang).
- Demikian pulalah fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan Sebagaimana respon atas berbagai isu lingkungan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPd disusun menjelang program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu anggaran indikatif dokuemen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun , yang memuat drafir dokuumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun , yang memuat drafir penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPd sebagai menjalani pedoman penyusunan rencana SKPD serta menjalani acuan proses penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA), perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum dijalankan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 telah disusun pada Februari 2021. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPd, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum dilakukan awal RKPd.

Dalam rancangan awal RKPd program yang dicantumkan dalam rencana Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

 1. Program Penunjang Urtisan Pemerintah Daerah
 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 3. Program Pengendalian Penemaran dan/stau Kritisasi Lingkungan
 4. Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) Hindu

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPd

Sebagaimana respon atas berbagai isu lingkungan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPd disusun menjelang program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu anggaran indikatif dokuumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun , yang memuat drafir penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA), perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum dilakukan awal RKPd.

- Demikian pulalah fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan Sebagaimana respon atas berbagai isu lingkungan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPd disusun menjelang program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu anggaran indikatif dokuumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun , yang memuat drafir penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA), perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum dilakukan awal RKPd.

5. Program Pengendalian Bahau Berbahaya (B3) dan Limbah Bahau Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP LH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masayarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masayarakat
9. Program Pengembangan Lingkungan Hidup Untuk Masayarakat
10. Program Pengelolaan Persampahan

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dinas Lingkungan Hidup
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup

RKD yang akan diwujudkan dalam RKPDA 2020

1 indeks kritis lingkungan hidup 63,29 (%)

2 indeks kritis Air 53,61 (%)

3 indeks kritis Udara 38,30 (%)

4 indeks kritis Titaran Lahan 33,29 (%)

5 Persentase jumlah Sampah yang Tertingginya 50,16 (%)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan n Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Kinerja pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang dilegalisasi (2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD setelah 2022	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang Realisasi Renstra SKPD Tahun 2022 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8,90x10^-11	13 = 6 +12	14 = 738x10^03	15	
Tersedianya Adminstrasi Keuangan Daerah	01	Program Penunjang Urusan Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Sistem Kerja yang Akurasi selama 1 tahun	3.438.874.451	339.334.731	-							339.334.731	339.334.731	
Tersedianya Liputan Komunitas Sosial dan Organisasi	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelembagaan Administrasi Keuangan Daerah	2.716.446.023	318.478.895	-							318.478.895	318.478.895	
Tersedianya Aparatur Keuangan Sosial dan Organisasi	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Memperoleh Gaji dan Tunjangan ASN	24 Bulan	16.707.039.578	21 Orang	2.016.577.758	21 Bulan	313.218.095	21 Bulan	313.218.095	21 Bulan	313.218.095	313.218.095	0,02
Tersedianya Administrasi Keuangan Tugas ASN	01	Penyedian Administrasi Pihak Lain Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hirarquisasi Administrasi Pihak Lain Tugas ASN	5 Dokum	2.033.678.140	1 Dokum	20.859.267	0 Dokum	5.258.6100	0 Dokum	5.258.6100	0 Dokum	5.258.6100	5.258.6100	0,05
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokum	48.477.047	-	-	-	-	-	-	-	5.601.850	5.601.850	
Tersedianya Pengelolaan Penerapan Peraturan Daerah	01	Pengelolaan Peraturan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instansi/ Unit/Pemerintah Daerah yang Disusun	5 Paket	32.341.639	1 Paket	4.013.540	0 Paket	914.800	0 Paket	914.800	0 Paket	914.800	914.800	0,03
Tersedianya Bantuan dan Pendampingan Kantor	01	Penyediakan Bantuan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Operasional Kantor yang Disediakan	5 Paket	65.921.459	1 Paket	6.821.741	0 Paket	2.388.000	0 Paket	2.388.000	0 Paket	2.388.000	2.388.000	0,04
Tersedianya Bantuan dan Pendampingan	01	Penyediakan Bantuan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Operasional Kantor yang Disediakan	5 Paket	65.391.489	1 Paket	7.594.208	0 Paket	858.760	0 Paket	858.760	0 Paket	858.760	858.760	0,01
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SdP di Luar dan Dalam Provinsi	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SdP	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SdP	175 n	1.051.207.200	54 n	25.872.203	1 n	1.440.000	1 n	1.440.000	0 Paket	1.440.000	1.440.000	0,02
Tersedianya Jasa Pemeringkatan dan Pemantauan Dinas	01	Pemeringkatan Jasa Pemerintah Dinas	Tersedianya Jasa Pemeringkatan dan Pemantauan Dinas										10.137.106	10.137.106	

Rata-rata capatan kriteria (%)										Predikat kriteria										
Terkadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					Terkadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					Terkadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					Terkadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					
Terhadanya Jasa Sural Manggat	01	2.05	01	Pengelolaan Jasa Sural Manggat	Jumlah Laporan Surat Manggat	5	Laporan	99.174.370	1	Laporan	1.895.896	0	Laporan	-			0	Laporan	-	
Manggatnya Fungsi Umum Kantor	01	2.06	02	Pengelolaan Jasa Komunitas Sumatera Dayak dan Lautik	Jumlah Laporan Jasa Komunitas Sumatera Dayak dan Lautik yang Diolah	60	Laporan	352.949.304	12	Laporan	54.946.826	3	Laporan	10.137.186			3	Laporan	10.137.186	
Terkadengannya Fungsi Umum Pelabuhan	01	2.05	04	Pengelolaan Jasa Pelabuhan Umum Nauar	Jumlah Laporan Pelabuhan Umum Nauar yang Diolah	50	Laporan	2.358.000.000	12	Laporan	436.600.000	0	Laporan	-			0	Laporan	-	
Terpilihnya Frilias, Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Penenitian Daerah	04	2.06		Pembelahan Barang Milik Daerah Penulis Uraian Penelitian Daerah	Terpilihnya Frilias Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Penenitian Daerah			150.498.457	5.116.200		-	-		5.116.200			5.116.200			
Terendanya Penganggaran Projek BBM dan Perbaikan dan Operasional Dasar Lopangan	01	2.59	02	Pengelolaan Jasa Pengelolaan BBM dan Perbaikan Dasar Lopangan	Jumlah Kardsam Operasional atau Operasional atau Operasional dasar Lopangan dan Perbaikan Projek dan Pemeliharaan	17	Unit	1.252.380.000	10	Unit	168.638.887	0	Unit	5.119.200			0	Unit	5.119.200	
Terpelepasnya Persilatan dan Mesin Larinya	01	2.09	06	Pembenturan Persilatan dan Mesin Larinya	Jumlah Peralatan Larinya yang Diperlukan	31	Unit	97.784.607	18	Unit	11.820.000	0	Unit	-			0	Unit	-	
Rata-rata capatan kriteria (%)										Predikat kriteria										
Terkadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					Terkadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					Terkadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					Terkadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					
Terhadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				35.298.916										Rendah		
Terhadanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0.3	2.01		Pengelahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terhadanya pengelahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			35.298.916										Rendah		
Terhadanya korban dan perbaikan pengelahan lingkungan hidup	0.3	2.01	01	Koordinasi Sinergisasi dan Pengelahan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dikemasan Plastik Dikemasan Tetap Media Tercuci	5	Dokum	812.983.823	1	Dokum	35.258.916	0	Dokum	-	0	Dokum	-	DLM		
Terhadanya korban dan perbaikan pengelahan lingkungan hidup	0.3	2.01	04	Pengelahan Lingkungan Hidup	Terdapatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup	5	Dokum	812.983.823	1	Dokum	35.258.916	0	Dokum	-	0	Dokum	-	DLM		
Rata-rata capatan kriteria (%)										Predikat kriteria										
Terhadanya kerusakan lingkungan hidup					Terhadanya kerusakan lingkungan hidup					Terhadanya kerusakan lingkungan hidup					Terhadanya kerusakan lingkungan hidup					
Terhadanya kerusakan lingkungan hidup	04			Program Pengelahan Kebersihan Hidup	Terhadanya kerusakan lingkungan hidup			124.191.225										Sangat Rendah		
Terhadanya kerusakan lingkungan hidup	04	2.01		Pengelahan Kebersihan Hidup	Terhadanya pengelahan kerusakan lingkungan hidup			124.191.225										Rendah		
Terhadanya kerusakan lingkungan hidup	04	2.01	04	Pengelahan Kebersihan Hidup	Lulus RTH yang Didikti Lingkup Kependidikan	0.162.168	Ha	2.225.288.540	0.1652.168	Ha	124.191.225	0	Ha	282.000	0	Ha	282.000	+	DLM	
Terhadanya kerusakan lingkungan hidup	04	2.01	04	Pengelahan Ruang Terluas Hidup	Kependidikan Lingkup Kependidikan														0	
Rata-rata capatan kriteria (%)										Predikat kriteria										
Terhadanya pengelahan lingkungan hidup					Terhadanya pengelahan lingkungan hidup					Terhadanya pengelahan lingkungan hidup					Terhadanya pengelahan lingkungan hidup					
Terhadanya pengelahan lingkungan hidup	06			Program pembelahan dan pengelahan Terhadap dan Lingkungan dan/atau Pengelahan dan pengelahan Lingkungan hidup	Terhadanya pengelahan dan pengelahan terhadap dan lingkungan hidup			22.320.216										Sangat Rendah		

(Penataan Ruang yang Berbasis Masyarakat dalam Mendukung pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pertama hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendukung prioritas Lingkungan". Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Lingkungan LABUHANBATU SELATAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN Labuhanbatu Selatan sebagaimana berikut : "BERSAMA MEWUJUDKAN Beranjak denagan visi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten terfokus yang bersifat spesifik, terperinci, terukur, dan dapat dicapai. mengambarakan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan kegiatan dalam rangka merelisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran kegiatan dalam rangka merelisasikan visi dan misi. Sedangkan akar mengarah kepada permusuhan sasaran, kebijakan, program dan Kepergawilan Daresah Kabupaten Labuhanbatu Selata. Penetapan tujuan keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Badan Penetapan tujuan dan sasaran merupakannya faktor-faktor kunci Kepengabdian Berlandaskan Gotong Royong" maka tema Rencana Berkeprihatinan Berlandaskan Gotong Royong, mandiri, dan Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan sesuai dengan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yakni " pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan Ekonomi dan Sistem Kelehatuan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif". Kerja Pembangunan (RKPD) Tahun 2022 adalah "Memantapkan Pemulihian Berkeprihatinan Berlandaskan Gotong Royong" maka tema Rencana Berkeprihatinan Berlandaskan Gotong Royong, mandiri, dan Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Nasional maupun Propinsi.

3.1.1. Telahaaan terhadap Kebijakan Nasional
menyimpang dari kondisi pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyusun Perencanaan Dinas Lingkungan hidup dan Perikanan dengan telahaaan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.

USULAN PROGRAM, NEGATAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

BAB III

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinergia
1	Menentuk	Menugrahi	Tegangan	- Jumlah sekolah berwawasan lingkungan masarakat peduli lingkungan, serta meningkatkan masarakat oleh perilaku	masarakat peduli lingkungan - Masarakat peduli lingkungan masarakat oleh usaha/ kegiatan. masarakat /perilaku masarakat oleh usaha/ kegiatan.
					masarakat dalam kegiatan. masarakat paham pengelolaan jumlah masyarakat berkurban - tersedianya sarana dan prasarana volume sampah yang dikejola aktual pengelolaan TPS limbah B3

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas LH Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pengembangan Ekonomi Wilayah dan kualitas Lingkungan Hidup) dan ke-3 (Penitigkatan aksesibilitas dan kualitas Lingkungan pemukiman). Sehingga Dinas Lingkungan hidup Labuhanbatu Selatan mengusung tema renja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 yaitu “sinergitas pembangunan dalam meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup”.

Menyerahkan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2019 dan sinergitas pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Menyerahkan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2019 dan sinergitas pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

2022. Table 3.3 Ramalan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk pencapaianya dalam tahun kebijakan anggaran serta merupakannya komitmen bagi Dinas di mana penyusunan program kegiatan tersebut menjadibagi dari terutama untuk indikator hasil (outcome) dan kelaaran (output) seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akhirnya yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh sasaran yang akan dilaksanakan dan kinerja untuk tujuan dan program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan 2022.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

2	Mengembangkan	Meningkatkan	Tercapainya	- Data	Status	sistem informasi dan teknologi keakuratan data	SDA dan LH	Lingkungan.
---	---------------	--------------	-------------	--------	--------	--	------------	-------------

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

SKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2	11	03	2.01	(0)	Kordinasi Sistematis dan Pembelajaran Pengembangan Hidup Disabilitas Termasuk Medis Tanah Air, Utama dan Lainnya	Keluaran en Lakukain Kultus Hidup Sekutu	Rasio Pengeluaran Pembelajaran Pengetahuan Lingkungan Hidup	Telah dilaksanakan Terdapatnya Pengetahuan Pengetahuan Lingkungan Hidup	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Diklat/Pengembangan Terdapat Mata Terdapat Mata Diklat dan San Lainnya	1 Dokumen	35.259.915	Kognitif Rasio Pengetahuan Pembelajaran Lingkungan Hidup	1 kegiatan	Telah dilaksanakan Pengetahuan Pengetahuan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Hidup Disabilitas Termasuk Medis Tanah Air, Utama dan Lainnya	1 Dokumen	35.259.915	0	DLM-P		
2	11	04	2.01	(0)	PROGRAM PENGELAKUAN KEAMERIKAHAN HAYATI (KEHATI) Pengelahan Kemampuan Hidup	Pengelahan Riang Teribus Hidup (RTH)	Natalia en Lakukain Kultus Hidup Sekutu	Menyajikan Menyajikan Produksi Ruang 1 Kegiatan	Telah dilaksanakan Terdapatnya Produksi Ruang 1 Kegiatan	124.191.235	Kognitif Menyajikan Produksi Ruang 1 Kegiatan	124.191.235	Kognitif Menyajikan Produksi Ruang 1 Kegiatan	Lama RT/Hanya Diklat/Latihan Konservasi Konservasi Waktu	0.1052 Ha	124.191.235	Kognitif Menyajikan Produksi Ruang 1 Kegiatan	Lama RT/Hanya Diklat/Latihan Konservasi Konservasi Waktu	0.1052 Ha	250.000.000	125.808.765	DLM-P
2	11	04	2.01	(0)	PROGRAM PENGELAKUAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERIJININGAN DAN PERIZAHOLAHAN DAN PERIZAHOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPHL)	Pembinaan dan Usaha dimulai Konstan yang tena Lingkungan dan izin-PPHL di terbitkan oleh Pemimpinan Daerah Kabupaten/Kota				22.329.215										105.337.007	83.007.792	
2	11	06	2.01	(0)	Fasilitasi Pemeringan Keterlibatan dan Kewilliam Untuk Lingkungan dan/atau izin-PPHL	Rahasia en Lakukain Kultus Hidup Sekutu	Wenjata kebutuhan dan/atau pengetahuan 1 Kegiatan	Telah dilaksanakan dan/atau pengetahuan merupakan 1 Kegiatan	Jumlah Dokumentasi dalam Prosesum Terkait dengan Lingkungan dan Kehidupan 1 Kegiatan	0 Dokumen	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Jumlah Dokumen dalam Lingkungan dan Kehidupan 1 Kegiatan	0 buku Sekian	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Jumlah Dokumen dalam Lingkungan dan Kehidupan 1 Kegiatan	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	0 buku Sekian	30.000.000	30.000.000	DLM-P
2	11	06	2.01	(0)	Pengawasan Usaha dagangan Kehidupan yang zin Lingkungan Hidup, zin PPHL yang Diambil oleh Pemimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kehidupan en Lakukain Kultus Hidup Sekutu	Mengintu dilakukan sebagaimana perintah 1 Kegiatan	Telah dilaksanakan Perintah dilakukan denan perintah 1 Kegiatan	Jumlah Laporan Diklat Untuk Diklat yang Diklat yang 1 Kegiatan	0 Dokumen	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Jumlah Dokumen dalam Lingkungan dan Kehidupan 1 Kegiatan	0 buku Sekian	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Jumlah Dokumen dalam Lingkungan dan Kehidupan 1 Kegiatan	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	0 buku Sekian	30.000.000	30.000.000	DLM-P
2	11	08	2.01	(0)	PROGRAM PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Pengabdian Pendidikan dan Pengabdian Lingkungan Hidup (PPHL) Kabupaten/Kota					22.329.215										105.337.007	83.007.792	
2	11	10	2.01	(0)	PROGRAM PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten/Kota	Mengintu Perintah dan Lingkungan Hidup 1 Kegiatan	Telah dilaksanakan Perintah dan Lingkungan Hidup 1 Kegiatan	Jumlah Pengabdian Mengintu Terkait Kabupaten/Kota 0 Dokumen	Kabupaten Budaya Pengetahuan Lingkungan Hidup 1 Kegiatan	0 buku Sekian	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Menyajikan Menyajikan Produksi 1 Kegiatan	Jumlah Pengabdian Mengintu Terkait Kabupaten/Kota 0 Dokumen	0 buku Sekian	20.000.000	20.000.000	DLM-P				
2	11	10	2.01	(0)	Pengabdian Pengabdian Kabupaten/Kota					0									20.000.000	20.000.000		

3	25	05	2.01	Penggunaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Damu, Watuk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Dalam Kabupaten/Kota				51.410.800
3	25	05	2.01	Penggunaan Isoba Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Damu, Watuk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan dalam Kabupaten/Kota	Tersedia Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Damu, Watuk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Tersedia Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Damu, Watuk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan dalam Kabupaten/Kota	51.410.800
3	25	05	2.01	Penggunaan Isoba Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Damu, Watuk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan dalam Kabupaten/Kota	Keliputan: Sungai, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Keliputan: Sungai, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan dalam Kabupaten/Kota	51.410.800



H. SYARIFUDIN, MM
NIP. 19660828 199903 1 007

NIP. 19660808 198903 1 007
PEMBINA TK.I
H.SYARIFUDIN, ST, MM



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DAN PERIKANAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kotapinang, Juni 2022

Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini akan dapat tercapai, dilaksanakan dengan penuruh dedikasi, komitmen dan kerjasama dari seluruh anggota masyarakat dan instansi terkait. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Selatan menyatakan bahwa rancangan perubahan rencana kerja tahunan ini memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah dalam rangka memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat dan instansi terkait untuk terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan aman. Pada akhirnya, rancangan perubahan rencana kerja ini akan memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah dalam rangka memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat dan instansi terkait untuk terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan aman.

Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Selatan 2022 sebagaimana menjadikan salah satu dasar di dalam pengetahuan dan pengembangan referensi dalam pengetahuan dan pengembangan lingkungan hidup. Diharapkan sebagaimana acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan yang disusun ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung terlaksananya tujuan pokok dan fungsi yang memprioritaskan kebutuhan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Diharapkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait selaras dengan tujuan dan fungsi yang memprioritaskan kebutuhan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

PENUTUP

BAB IV